ISSN 1829-8001
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

LIPI

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018

TURBULENSI KEPEMIMPINAN DAN KONEKTIVITAS ANTAR NEGARA

- Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un
- Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016
- Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas
- Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia
- Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka: *City to City Connectivity* sebagai Pendukung Koridor Ekonomi

RESUME PENELITIAN

- Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

REVIEW BUKU

- Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 1	Hlm. 1-127	Jakarta, Juni 2018	ISSN 1829-8001

Jurnal Penelitian Politik

LIPI

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris *(Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi)*
Prof. Dr. Indria Samego *(Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan)*
Dr. C.P.F Luhulima *(Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa)*
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA *(Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal)*
Dr. Lili Romli *(Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian)*
Drs. Hamdan Basyar, M.Si *(Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam)*
Dr. Sri Nuryanti, MA *(Ahli Kepartaian dan Pemilu)*
Dr. Ganewati Wuryandari, MA *(Ahli Kajian Hubungan Internasional)*
DR. Yon Machmudi, M.A *(Ahli Studi Islam dan Timur Tengah)*
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si *(Ahli kepemiluan dan kepartaian)*
Ratna Shofi Inayati, MBA *(ASEAN dan politik luar negeri)*

Penanggung Jawab
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemimpin Redaksi
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D *(Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian)*
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc *(Ahli Kajian Hubungan Internasional)*
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si *(Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian)*
Dra. Sri Yanuarti *(Ahli Kajian Konflik dan Keamanan)*
Drs. Heru Cahyono *(Ahli Kajian Politik Lokal)*

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA *(Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan)*
Indriana Kartini, MA *(Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik)*

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Jurnal Penelitian
Politik
Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Catatan Redaksi iii

Artikel

- **Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un**
  Indriana Kartini 1–13
- **Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016**
  Meutya Viada Hafid 15–30
- **Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas**
  Arif Novianto, dkk 31–48
- **Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia**
  Siswanto 49–63
- **Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka: *City to City Connectivity* sebagai Pendukung Koridor Ekonomi**
  Awani Irewati 65–80

Resume Penelitian

- **Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik**
  Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk 81–96
- **Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab**
  M. Fakhry Ghafur, dkk 97–113

Review Buku

- **Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen**
  Defbry Margiansyah 115–125

Tentang Penulis 127–128
Pedoman Penulisan 129–133

CATATAN REDAKSI

Kepemimpinan politik mengalami dinamika menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Tak pelak kondisi tersebut menimbulkan konsolidasi di tingkat kepemimpinan maupun justru sebaliknya menimbulkan turbulensi. Meski demikian, konsensus merupakan upaya yang mesti dilakukan dalam menjaga stabilitas nasional maupun hubungan antar negara.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan kepemimpinan. Artikel pertama yang ditulis oleh Indriana Kartini berjudul " DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN", menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjan Panmunjom.

Artikel berikutnya, "KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016". Artikel yang ditulis oleh Meutya Viada Hafid ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menujukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016.

Sementara itu, artikel "DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS" yang ditulis oleh Arif Novianto, dkk mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme.

Turbulensi kepemimpinan di Amerika Serikat juga dibahas dalam artikel "KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA" yang ditulis oleh Siswanto. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Kebijakan membela kepentingan nasional (*America First*) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (*make America great again*) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian in-konsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya tubulensi kepemimpinan dunia.

Artikel terakhir membahas tentang "DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI" yang ditulis oleh

Awani Irewati. Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Selain kelima artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, dan Nostalgiawan Wahyudi, "PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB". Tulisan ini mengulas berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif.

Naskah kedua, "POLA PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA: PERSPEKTIF POLITIK", ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, dan Yusuf Maulana. Tulisan ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Adam Bower "NORMS WITHOUT THE GREAT POWERS: INTERNATIONAL LAW AND CHANGING SOCIAL STANDARDS IN WORLD POLITICS". *Review* yang ditulis Defbry Margiansyah menelaah tentang institusi internasional dan aturan-aturannya dekade belakangan dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak "jejaring struktur sosial" hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana

dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral "non-great powers."

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemimpinan maupun konektivitas antar negara. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian
Politik
Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DDC: 327.519305194
Indriana Kartini

DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 1-13

Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjan Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina.

Kata kunci: Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un

DDC: 324.2598
Meutya Viada Hafid

KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 15-30

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menujukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Mereka bertindak bukan hanya sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI, tetapi perubahan tersebut tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI

diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik dari Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan musyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Kata kunci: Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.

DDC: 324.23
Arif Novianto, Lukman Kurniawan dan Samodra Wibawa

DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 31-48

Dalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut. Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tangga-tangga menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.

Kata kunci: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

---

DDC: 321.804273
Siswanto

KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 49-63

Latar belakang penulisan artikel ini didasari oleh petimbangan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Selanjutnya masalah yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah kepribadian inkonsisten Presiden Donald Trump yang berpengaruh kepada lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversi. Kebijakan membela kepentingan nasional (America First) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (make America great again) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian inkonsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya tubulensi kepemimpinan dunia.

Kata kunci: kontroversi, turbulensi, kebijakan Amerika, Presiden Trump

---

DDC: 327.15951
Awani Irewati

DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: *CITY TO CITY CONNECTIVITY* SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 65-80

Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Kata kunci: kerja sama subregional, *city to city connectivity,* koridor ekonomi, Selat Malaka

---

DDC: 320.95380536705357
Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

RESUME PENELITIAN POLA PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA: PERSPEKTIF POLITIK

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 81-96

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.

Kata kunci: pengawasan, dana otsus/istimewa, perspektif politik.

DDC: 352.14
M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgiawan Wahyudi

RESUME PENELITIAN PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 97-113

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yang diperkaya dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh pendalaman,

penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Di antaranya melalui berbagai literatur, jurnal, media elektronik dan cetak, juga media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan akurat, dilakukan penelitian lapangan di Arab Saudi (Jeddah, Mekkah dan Madinah) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para pakar, akademisi di beberapa universitas, dan tokoh yang yang terkait dengan pokok kajian.

Kata kunci: Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

---

DDC: 341

Defbry Margiansyah

REVIEW BUKU KEKUATAN SOSIAL HUKUM: MENUNDUKKAN NEGARA KEKUATAN BESAR MELALUI INSTITUSI MULTILATERAL INDEPENDEN

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 115-125

Dalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak "jejaring struktur sosial" hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral "non-great powers."

Kata kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau.

Jurnal Penelitian

Politik

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

PANMUNJOM DECLARATION AND KOREAN PEACE PROSPECTS IN MOON JAE-IN AND KIM JONG-UN ERA

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 1-13

The Panmunjom Declaration signed by two Korean leaders, Moon Jae-in from South Korea and Kim Jong-un from North Korea marked a new era in peace on the Korean Peninsula. Although skepticism about positive implications has emerged both domestically and internationally, the commitment of the two Koreas to end the war should be appreciated by the international community. This paper analyzes how the Panmunjom Declaration influences regional and international security as well as the prospects for Korean peace and unification after the Panmunjom agreement. Based on the analysis through a qualitative approach, it can be concluded that although there were some similarities between the Panmunjom High Level Meeting and the previous High Level Meetings in 2000 and 2007, what needs to be underlined is the fact that the two Korean countries still have the desire to create a peace regime. Although in realizing this, the involvement of two allied countries in Korea, namely the US and China, is still needed.

Keywords: *Panmunjom Declaration, Korean peace, South Korea, North Korea, Moon Jae-in, Kim Jong-un*

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

POLITICAL CONSENSUS ON GOLKAR PARTY CONFLICT IN 2014-2016

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 15-30

This study discusses the phenomenon of political consensus of Golongan Karya (Golkar) Party after internal conflict in 2014-2016. The Golkar Party consensus is a new phenomenon, because the previous Golkar Party conflict has always brought new parties. The results of the study showed that the Golkar Party consensus occurred in the three stages. First stages through the organization's channels, namely the Golkar Party Court, the second through legal channels, the third through the political channels. The political channels shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub Golkar Party in May 2016. Munaslub agreed on various matters, including (1) the decision to set Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) the change of Golkar Party's position to the supporting party of Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The political consensus of Golkar Party in 2016 was also conducted through intermediaries. The intermediaries in the political consensus of Golkar Party are Jusuf Kalla and Luhut Panjaitan acting as government representatives and also as Golkar Party officials. The new Golkar Party Leaders also made changes in the Golkar faction of the House of Representatives. Unlike before where the losing faction was removed, the Chairman of the Golkar Party Faction was filled by Setya Novanto (from

Aburizal Bakrie faction) and Secretary of Golkar Party Faction filled by Agus Gumiwang Kartasasmita (from Agung Laksono faction). While the Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I and II are affected by the conflict at the Center, also reorganized by leaders of the new Golkar Party. In each DPD I and II, participatory discussion was conducted to elect the leaders of the Golkar Party DPD, in purpose to unify the two stewardship in the region. As for Aburizal Bakrie and Agung Laksono, each given a position on the management of the Golkar Party. Aburizal Bakrie was given the position as Chairman of the Advisory Council of Golkar Party which last appeared during the New Order, while Agung Laksono was given the position of Chairman of the Golkar Party Expert Council.

Keywords: *Golkar Party, Political Consensus, Political Party, Indonesia*

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan and Samodra Wibawa

DYNAMICS OF DEMOCRATIC PEOPLE PARTY (PRD) MOVEMENTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF REVOLUTIONARY PARTY AND BROAD-LEFT PARTY PERSPECTIVES

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 31-48

Within a Marxist tradition, social movements and social changes cannot be viewed as separated from the class contradictions and struggles as well as the roles played by mass organisations or parties. The current development of Marxism resulted in the emergence of two polar traditions in political parties, between those with a vanguardist or revolutionary leanings and those of social-democratic or broad-left leanings. These two tendencies have their own advantages and drawbacks depending on the circumstances in which they operated. This study attempts to elaborate the movement dynamics of People's Democratic Party (PRD) in their efforts to achieve the ideals of socialism which they championed. I divided the history of PRD into two different periods, between the New Order period in which they maintained a revolutionary-vanguard tendency and the post-Reformasi period in which there is a shift towards social-democratic tendency that emphasised Soekarnoist ideology. This study also tries to uncover the material basis behind such changes. Analysing these changes is crucial because the shift in tendency influenced the changes in the strategies to oppose capitalism and the tactics to establish the various steps towards socialism.

Keywords: *Marxism, People's Democratic Party, Revolutionary Party, Broad-Left Party*

DDC: 321.804273

Siswanto

LEADERSHIP OF DONALD TRUMP AND TURBULENCE OF WORLD ORDER

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 49-63

The background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.

Keywords: *controversy, turbulence, American policy, President of Trump*

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DYNAMIC OF SUB-REGIONAL COOPERATION IN MALACCA STRAITS: CITY TO CITY CONNECTIVITY AS A SUPPORTING ECONOMIC CORRIDOR

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 65-80

Connectivity is one of the important factors in building a cooperation at bilateral, regional and international levels. City to city connectivity realm becomes the backbone in an economic corridor of a subregional cooperation like IMT-GT. This article presents a review of the dynamics of the two economic corridors, namely Medan–Penang Island connectivity and Dumai–Melaka connectivity at the Straits of Malacca, and a little review of the future of city to city connectivity for Indonesia and Malaysia. The writing method of this article is based on qualitative analysis, with the essence of the findings are that as the smallest node in connectivity realm, these two connectivities determine the dynamics of the economic corridors between Indonesia and Malaysia. And this condition will remain as an determining factor for the sustainable cooperation between the two countries, and for subregional cooperation of the IMT-GT in the future.

Keywords: *subregional cooperation, city to city connectivity, economic corridor, the straits of Malacca*

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

SUMMARY RESEARCH THE CONTROL PATTERN OF SPECIAL FUND MANAGEMENT: POLITICAL PERSPECTIVE

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 81-96

This study examines the special fund management control patterns from a political perspective. There are three areas studied namely, Aceh, Papua, and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). These three areas are important to be learned since they have specialization and privileges in fiscal management, particularly special fund management. However, central government oversight of special fund management is weak. This is evidenced by the lack of supervision in terms of synergy, coordination, supervision, and supervision between levels of government (province/district). As a result, special fund management does not have a significant impact on improving democratic and harmonious governance through vertical (central-local) or horizontal (local-local) relationships and improving the welfare of local communities. Therefore, this study proves the importance of monitoring to special fund management. The research methods are conducted through collecting supporting documents, in-depth interviews, and focus group discussion.

Keywords: *controlling, special fund, a political perspective*

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgiawan Wahyudi

SUMMARY RESEARCH PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN SAUDI ARABIA, KUWAIT AND UNI EMIRAT ARAB

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 97-113

Political Islam has a significant influence for a political dynamics in Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates. The Gulf War in 1991 has be became catalyst for changes of monarchy policy, both internal and external. In Saudi Arabia the Islamist movement and their anti-liberal supporters took place during and after the war, which demanded change. While in Kuwait, the monarchy moves the opposition group. The formation of opposition Islamic Contitutional Movement (ICM) group against the government has attracted Muslim Brotherhood (IM) in a political conflict for reform. This is a challenge for ICM to gain wider political influence in the political constellation in Kuwait. While in the United Arab Emirates, the government claim the opposition as a threat for national security. The various of political Islam activities in Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates will be the focus of the research. The Research methods in this study used a qualitative methodology through deskriptive-analytical approach, fortified with the study literature and the fieldworks.To obtain deepening, this research begins by the searching of primary and secondary data through literature study. Among them through a various literature, journals, electronic media, well as the internet that provide important information for analysis and identify of map the Issues. To produce a sharp and accurate analysis, the studies the field research was conducted in saudi arabia (Jeddah, Mecca and Medina) through indepth interviews with experts,

academics at several universities and figures related with the subject matter.

Keywords: *Political Islam, Saudi Arabia, Kuwait, and United Arab Emirates*

DDC: 341

Defbry Margiansyah

BOOK REVIEW
THE SOCIAL POWER OF LAW: TAMING GREAT POWERS THROUGH INDEPENDENT MULTILATERAL INSTITUTIONS

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 115-125

For last decade, international institutions along with their rules have been perceived merely as an instrument for maintaning influences and interests of great power countries. However, Norms Without Great Powers offers novel theoretical account regarding the prospect for independent international institutions in the times of great powers ambivalence, such as United States, through the effects of "nested" social structure of international law. This research shows how social dimension of normative international law shapes and restricts the behavior and expectation of the states in the conduct of international relations. The theoretical postulation drew on constructivist approach applied on empirical inquiry of of the Mine Ban Treaty and Rome Statute of International Criminal Court's comparative case study. This article aims to highlight and review the book's analysis critically. To this end, the critical review begins by elucidating main arguments, then providing presentation on main points of respective case studies. Finally theory-guided evaluation and its consequences on problems founds in the case of international law's implementation promoted by "non-great power" multilateral institution will come ***up prior to concluding remarks.***

Keywords: *Multilateralism, international law, norms, power politics, ICC, MBT*

KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA

LEADERSHIP OF DONALD TRUMP AND TURBULENCE OF WORLD ORDER

Siswanto

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik - LIPI)
Email: sish_jakarta@yahoo.com

Diterima: 26 Maret 2018; direvisi: 22 Mei 2018; disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

The background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.

Keywords: *controversy, turbulence, American policy, President of Trump*

Abstrak

Latar belakang penulisan artikel ini didasari oleh petimbangan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Selanjutnya masalah yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah kepribadian in-konsisten Presiden Donald Trump yang berpengaruh kepada lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversi. Kebijakan membela kepentingan nasional (*America First*) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (*make America great again*) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian in-konsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya tubulensi kepemimpinan dunia.

Kata kunci: kontroversi, turbulensi, kebijakan Amerika, Presiden Trump

Pendahuluan

Latar Belakang penulisan artikel ini didasarkan petimbangan bahwa kebijakan Amerika di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga menimbulkan keresahan baik di dalam maupun di luar negeri. Keresahan ini berpotensi melahirkan terjadinya turbulensi tatanan dunia atau sistem internasional. Secara terminologi turbulensi disini dimaknai sebagai kondisi bergolak yang diwarnai oleh kekacauan.[1] Jadi, dalam hal ini turbulensi tatanan dunia dipahami sebagai suatu kondisi tatanan regional maupun global yang bercirikan oleh suasana kacau atau tidak terkendali. Atau dalam pengertian bahwa perilaku negara tidak lagi memerhatikan sistem nilai, aturan, hukum, dan kebiasaan yang sudah disepakati dalam sistem internasional. Perilaku suatu negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya menjadi abai terhadap tatanan atau sistem internasional yang ada.

Kontroversi kebijakan luar negeri Amerika selama kepemimpinan Presiden Trump bisa diidentifikasi dari indikator kontroversi ekonomi dan politik. Kontroversi ekonomi misalnya Presiden Trump menyampaikan isu *America First* pada pidato pelantikannya di Gedung Putih pada 21 Januari 2017. Isu *America First* adalah gagasan untuk fokus pada kepentingan nasional dan mengabaikan kepentingan asing. Isu ini bermuara kepada kebijakan proteksi dalam perdagangan internasional dan pengetatan imigran masuk ke Amerika. "From this moment on, it's going to be America First". Hal ini sebenarnya tidak mengejutkan jika dirunut dari konten kampanye Presiden Trump yang sudah menunjukan gejala kearah itu. Hal ini juga gejala bahwa arah kebijakan luar negerinya mengarah kepada " inward looking foreign policy."

Implikasi dari "inward looking foreign policy" adalah keluar dari tatanan global maupun regional. Pada 23 Januari 2017 Presiden Trump menyatakan menarik diri dari *the Trans-Pacific Partnership (TPP)* yakni suatu bentuk kerja sama ekonomi sejumlah negara dimana Amerika Serikat di bawah Presiden Obama menjadi pendukung utama organisasi tersebut. Namun demikian, Presiden Trump punya pandangan berbeda atas TPP. Presiden Trump memandang zone perdagangan bebas ini hanya akan merugikan kepentingan ekonomi Amerika dan bertentangan dengan semangat "America First" atau "inward looking foreign policy" yang dikembangkannya.

Selanjutnya, kontroversi politik yang dilakukan Presiden Trump adalah mengeluarkan *Executive Orders* pada 27 Januari 2017 yang tujuannya untuk melindungi warga Amerika dari serangan teroris. Isi dari surat perintah itu adalah warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim dilarang masuk Amerika yaitu Irak, Iran, Yaman, Suriah, Somalia, Sudan, dan Libia. Warga negara dan pengungsi dari ketujuh negara ini dicurigai atau berpotensi melakuan teror di Amerika. Akibatnya, kebijakan Presiden Trump ini menuai kritik dari sejumlah negara khususnya negara-negara yang berpenduduk Muslim dan menimbulkan sikap anti Amerika.

Selanjutnya, pada 30 Januari 2018 Presiden Trump menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya dimana salah satu isu yang diusung adalah "Make America Great Again." Isu ini memuat gagasan untuk mengembalikan kekuatan Amerika di dunia. Dalam hal ini jaringan teroris internasional, Rusia, dan Cina ditetapkan sebagai ancaman yang harus direspon. Oleh karena itu, Amerika perlu memperkuat sistem pertahanannya dan Presiden Trump meminta dukungan kongres untuk peningkatan anggaran militer.[2] Upaya membangun kembali kekuatan Amerika adalah wajar, tetapi menyebutkan sejumlah negara sebagai musuh adalah sikap provokatif dan menghidupkan kembali semangat "Perang Dingin." Sikap Presiden Trump ini bertolak belakang dengan semangat kerja sama dan perdamaian dunia yang sedang tumbuh.

Platform kebijakan luar negeri Amerika punya perhatian besar pada isu keamanan. Seperti diketahui, prioritas kebijakan luar negeri Presiden Trump terdiri dari tiga komponen yang meliputi hal-hal sebagai berikut; (1) Kebijakan memerangi terorisme khususnya ISIS, (2)

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). http:KBBI.web.id./turbulensi, diakses 12 Maret 2018.

[2] Donald Trump," President Donald J. Trump's State of the Union Address", Januari, 30, 2018, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-state-u, diakses pada 17 Maret 2018.

membangun kembali kekuatan militer, dan (3) melaksanakan diplomasi persahabatan. Perang terhadap teroris merupakan bagian dari isu keamanan sehingga memperoleh porsi khusus dalam kebijakan luar negeri Presiden Trump. Hal ini dibukitkan dengan keberhasilan pasukan gabungan Amerika, Irak, dan Kurdi mengalahkan kekuatan ISIS di Irak.

Jadi masalah yang akan didiskusikan dalam tulisan ini adalah latar belakang kepribadian Presiden Donald Trump yang melahirkan kebijakan kontroversi dan implikasinya kepada tatanan dunia. Kebijakan kontroversi Presiden Trump telah menimbulkan turbulensi tatanan ekonomi dan politik di tingkat regional maupun global. Oleh karena itu, dalam artikel ini diajukan rumusan pertanyaan sebagai berikut: Apa yang mendasari munculnya kebijakan kontroversi Presiden Trump? Bagaimana pengaruh kebijakan kontroversi kepada terjadinya turbulensi pada tatanan regional dan global?

Berkenaan dengan pertanyaan tersebut maka kerangka pemikiran yang menjadi rujukan tulisan ini adalah suatu tesis bahwa setiap kepribadian seorang Presiden Amerika Serikat (AS) memiliki korelasi dengan arah kebijakan luar negeri yang ditempuhnya.[3] Kepribadian ini diidentifikasi ke dalam tipologi kepribadian Presiden Amerika yang dikategorikan ke dalam empat tipologi, yaitu: (1) aktif-positif, (2) aktif-negatif, (3) pasif-positif, (4) pasif-negatif. Seseorang dengan tipologi aktif-positif memiliki ciri sebagai berikut: senang kerja keras, kreatif, efektif dalam bekerja, respek terhadap orang lain, bahagia, terbuka terhadap ide-ide baru, dan mau belajar dari pengalaman. Seseorang dengan tipologi aktif-negatif memiliki ciri sebagai berikut: in-kosisten, sentimentil, dan punya rasa optimis. Seseorang dengan tipologi pasif-positif memiliki ciri antara lain; memburu dan mempertahankan kekuasaan, dan cenderung sangat berkuasa. Seseorang dengan tipologi pasif-negatif memiliki ciri sangat peduli pada kearifan atau nilai-nilai sosial.[4]

[3] Eugene. R Wittkopf, *American Foreign Policy: Pattern and Process*, (California: Thompson Higher Education, 2008), hlm. 45.

[4] *Ibid*

Konsep tentang kepribadian Presiden Amerika ini dilengkapi oleh suatu tabel yang diharapkan akan memperjelas konsep tersebut. Tabel di bawah ini memuat tipologi kepribadian atau karakter Presiden-Presiden AS terdahulu.[5] Studi yang dilakukan James D. Barber bersifat random saja sejak era Presiden ke-29 yaitu Warren Harding sampai dengan Presiden ke-40 yaitu Ronald Reagan, sehingga ada 17 orang Presiden yang dipetakan kepribadiannya atau karakternya. Tipologi kepribadian ini diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap karakter Presiden Amerika terdahulu dan arah kebijakan luar negeri Amerika dari waktu ke waktu. Sampai pada suatu pemahaman bahwa Presiden Amerika dengan karakter tertentu cenderung akan menghasilkan arah kebijakan luar negeri tertentu yang sejalan dengan katarkternya.

Tabel 1. Tipologi Kepribadian Presiden Amerika Serikat

	Kepribadian/Karakter	
Energi	**Positif**	**Negatif**
Aktif	Franklin D. Roosevelt Harry S. Truman John. F. Kennedy Gerald Ford Jimmy Carter George H.W.Bush Bill Clinton George W.Bush	Woodrow Wilson Herbert Hoover Lyndon Johnson Richard Nixon
Pasif	William Taft Warren Harding Ronald Reagan	Calvin Coolidge Dwight Eisenhower

Sumber: Eugene. R Wittkopf, *American Foreign Policy: Pattern and Process*, (California: Thompson Higher Education, 2008)

Setelah melalui telaah mendalam dan pengembangan terus-menerus tesis yang menjelaskan korelasi antara kepribadian atau karakter seorang Presiden dengan arah kebijakan luar negeri ini diharapkan bisa menjadi bagunan teori yang lebih kokoh dan komprehensif. Lebih dari itu, jika tesis di atas dikombinasikan dengan variabel-variabel lain dari kebijakan luar negeri diharapkan bisa menjadi kerangka pemikiran yang digunakan lebih luas atau universal yaitu tidak hanya menjelaskan arah kebijakan luar negeri Amerika, melainkan juga menjelaskan arah kebijakan luar negeri negara-negara lain di dunia.

[5] Eugene. R Wittkopf, *American Foreign Policy* ., hlm.495.

Jadi disamping dimensi kepribadian seperti tersebut di atas, arah kebijakan luar negeri Presiden Amerika juga dipengaruhi oleh sejumlah sumber lain yang mencerminkan aspek kepentingan dan ideologi. Hal itu meliputi tiga faktor atau variabel yaitu: (1) *National interest.* (2) *National values,* (3) *National objective*.[6] Ketiga variabel ini disebut *N-3 (three).* Ketika arah kebijakan Presiden Amerika penjelasannya dikombinasikan antara dimensi kepribadian ditambah *N-3(three)* maka proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika sudah lebih komprehensif.

Khusus identifikasi terhadap arah kebijakan luar negeri Presiden Trump dalam konteks *N-3 (three)* kelihatannya didominasi oleh nilai-nilai pragmatisme. Dalam hal ini Presiden Trump lebih mengedepankan variabel kepentingan nasional, sebaliknya kurang memberi porsi yang cukup kepada nilai-nilai Amerika atau dimensi ideologi. Konsekuensinya arah kebijakan luar negeri Presiden Trump menjadi terlalu pragmatis atau pragmatis ekstrim (extreme pragmatism). Kebijakan Presiden Trump hanya mempertimbangkan manfaat praktis bagi kepentingan dirinya dan Amerika, tetapi mengabaikan eksesnya bagi pihak lain. Wajar saja hal ini tidak hanya ditolak di luar negeri, tetapi juga ditolak di dalam negeri karena kebijakan pragmatis ekstrim ini.

Sebagai bentuk penolakan itu beberapa pejabat Amerika mengundurkan diri dan sebagian diberhentikan karena tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Trump. Mereka antara lain adalah (1) Patrick Kennedy Pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS mengundurkan diri pada Januari 2017, (2) Michael Flynn, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Trump mundur dari jabatannya pada Februari 2017 setelah ketahuan melakukan kontak dengan pejabat Rusia saat musim kampanye presiden tahun 2016, (3) Hope Hicks, Direktur Komunikasi Gedung Putih menyatakan mundur pada Februari 2018, (4) Steve Bannon, Penasehat Strategi dan Kebijakan Luar Negeri mengundurkan diri pada Agustus 2017, (5) Sebastian Gorka, Pejabat Keamanan Nasional Gedung Putih mengundurkan diri Pada Agustus 2017 karena tidak setuju dengan keputusan Trump mengirim banyak pasukan ke Afghanistan, (6) John Feeley, Duta besar Amerika Serikat untuk Panama mengundurkan diri pada Desember 2017 karena merasa tak sejalan dengan kebijakan Trump, (7) Sean Spicer, Juru bicara Gedung Putih mundur dari jabatannya pada Juli 2018, (8) Andrew McCabe, Wakil Direktur FBI mengundurkan diri pada Januari 2018 karena Trump menuduh dirinya simpatisan Partai Demokrat,[7] (9) Jeff Sessions, Jaksa Agung mengundurkan diri pada 10 Maret 2017 karena terlibat konflik dengan Presiden Trump terkait dengan mekanisme penyidikan terhadap James Comey Direktur FBI,[8] (10) Terakhir Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri dipecat oleh Presiden Trump[9] karena dihina dan terlibat konflik dengan Presiden Trump.[10]

Selanjutnya, variabel lain yang juga relevan untuk menjelaskan arah kebijakan luar negeri Presiden Trump dan turbulensi tatanan regional dan global khususnya dari perspektif eksteral adalah konsep sistem internasional. Sistem internasional adalah himpunan yang terdiri dari sejumlah unit (negara) yang saling berinteraksi di dalam suatu struktur,[11] baik struktur anarki maupun hirarki. Amerika sebagai negara adidaya punya pengaruh (*power*) ketika berinteraksi dalam struktur tersebut. Sebaliknya, arah kebijakan luar negeri Amerika juga dipengaruhi oleh interaksinya dengan struktur internasional. Oleh karena itu, arah kebijakannya sebagai bentuk interaksi dengan negara lain dalam

[6] Marian D. Irish, *The Politics of American Democracy*, (New Jersey: Prentice Hall Intrenational, Inc. 1965), hlm. 612.

[7] Redaksi, 2018." 7 Pejabat Donald Trump yang Mengundurkan Diri" https://kumparan.com/@kumparannews/7-pejabat-donald-trump-yang-mengundurkan-diri, diakses pada 17 Mei 2018.

[8] Voa Indonesia."Trump Sebut Jaksa Agung Sessions 'Memalukan". https://www.voaindonesia.com/a/trump-sebut-jaksa-agung-memalukan-/4275462.html, diakses pada 17 Mei 2018.

[9] Redaksi, 2018, " Menteri Luar Negeri Rex Tillerson Dipecat Presiden Donald Trump" http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43389324, diakses pada 18 Mei 2018.

[10] Redaksi, 2017, "Menlu AS Rex Tillerson Bantah Dia Mempertimbangkan Untuk Mundur", http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41505679, diakses pada 18 Mei 2018.

[11] Barry Buzan, "The Idea of "International System": Theory Meets History" *International Political Science Review* , Vol. 15, No. 3, (1994), hlm. 231-255, http://www.jstor.org/stable/1601200, diakses pada 24 Mei 2018.

struktur internasional punya dampak kepada tatanan regional maupun global.

Jadi sistem intenasional sebagai suatu konsep relevan untuk menjelaskan fenomena hubungan internasional atau politik internasional khususnya terkait dengan isu diplomasi dan militer. Sedangkan, sistem dunia adalah suatu konsep relevan untuk menjelaskan isu ekonomi politik dari tatanan global. Implikasi dari sistem dunia (*world system*) tidak secara langsung kepada aspek politik.[12] Secara umum sama antara sistem politik internasional dan sistem dunia adalah sama, tetapi ada sedikit perbedaan tentang isu-isu yang terkandung dalam masing-masing sistem.

Selain sistem internasional juga ada subsistem intenasional. Subsistem adalah deskripsi tentang mekanisme interaksi internasional di tingkat kawasan atau regional. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai sistem kawasan atau sistem regional. Dalam sistem internasional dijumpai sejumlah kategori. Morton Kaplan merumuskannya sebagai berikut: (1) *the balance of power*, (2) *the loose bipolar system*, (3) *the tight bipolar system*, (4) *the universal system*, (5) *the hierarchical system* dan (6) *the unit veto system*.[13] Kategori *the balance of power* dijumpai di sejumlah kawasan khususnya di era Perang Dingin. Sedangkan t*he unit veto system* dijumpai di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sementara itu, Kenneth Waltz mengidentifikasi bahwa dalam sistem internasional atau tatanan internasional terdapat tiga variabel penyebab terjadinya konflik yaitu: 1) sifat manusia, 2) fitur negara, 3) struktur internasional. Sifat manusia disini adalah termasuk di dalamnya karakter atau kepribadian dari seorang pemimpin sebuah negara. Sedangkan fitur negara dimaknai sebagai bentuk pemerintahan atau negara demokrasi atau otoriter. Terakhir, struktur internasional adalah kondisi yang menjamin terperiharanya stabilitas internasional.[14] Sistem internasional terdiri dua komponen yaitu struktur dan interaksi antar unit (negara).[15] Struktur internasional merupakan tempat dimana sejumlah negara melakukan interaksi. Dalam sistem internasional tersebut, konflik antar negara kerap kali terjadi dikarenakan oleh sifat anarki dari struktur internasional itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelesaian atau solusinya untuk meredam konflik tersebut perlu dibangun struktur internasional yang kondusif untuk terwujudnya stabilitas-keamanan dan perdamaian.

Turbulensi Tatanan Regional dan Global

Kepribadian Kontroversi

Jika dilihat dari perilaku politik Presiden Trump sejak dia mengikuti kampanye Pilres 2016 sampai setahun pemerintahannya menunjukan gejalanya dia berada dalam kategori aktif-negatif. Sikap Presiden Trump in-konsisten dengan nilai-nilai ideal bangsa Amerika bisa dikonfirmasi dalam perilaku politiknya. *Pertama*, seperti diketahui bahwa masyarakat Amerika selama ini menjunjung nilai-nilai keterbukaan, demokrasi, persamaan dan kebebasan. Sikap Presiden Trump yang anti-imigran bertentangan dengan nilai-nilai ideal masyarakat Amerika dan nilai-nilai universal (*the universal syste*m). *Kedua,* budaya politik masyarakat Amerika menempatkan Rusia sebagai pewaris Uni Soviet sehingga umumnya masih memposisikan Rusia sebagai lawan ketimbang kawan. Berbeda dengan Presiden Trump pada masa kampanye Pilpres 2016 dan awal pemerintahnya menempatkan Rusia sebagai kawan. Kebijakan Presiden Trump terhadap Rusia bersifat kontroversi karena bertentangan dengan orientasi politik Amerika terhadap Rusia baik dalam konteks lunak (*the loose bipolar system*) maupun keras (*the tight bipolar system*).

Kepribadian in-konsisten ini dipandang menjadi stimulus kepada kebijakan kontroversi Presiden Trump. Kebijakan kontroversi ini pula yang menodorng kepada turbulensi baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, menurut survei *American Political Science Association* (APSA), Presiden Trump adalah Presiden paling buruk dan paling memecah belah masyarakat dalam sejarah Amerika. Hanya saja

[12] Lihat: Ryuhei Hatsuse, "Intenational System," *Government and Politics* ,Vol.II, (Kobe: Kobe University)

[13] *Ibid.,* hlm. 3.

[14] Kenneth Waltz, 2003, "The Idea of Structure in International Relations Theory," http://globetrotter.berkeley.edu/people3/Waltz/waltz-con4.html, diakses pada 21 Mei 2018.

[15] Ryuhei Hatsuse, "Intenational System ., hlm. 4.

yang perlu dikrtisi dari hasil survei ini adalah komposisi responden dinilai kurang representatif dan berimbang dimana teridentifikasi 57,2% pendukung Partai Demokrat, 12,7% pendukung Partai Republik, dan 27,1 % independen.[16] Dengan demikian, terlepas dari kekurangan dari survei tersebut, Presiden Trump sebenarnya sedang mengalami masalah legitimasi politik dari rakyatnya. Hal ini kemudian nampak pada pidato kenegaraannya pada 30 Januari 2018.

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Trump berkali-kali menghimbau kepada rakyat Amerika agar bersatu kembali. Dibalik imbauan tersebut, Presiden mengharap dukungan utuh dari seluruh rakyat Amerika. Seperti diketahui bahwa sebagian rakyat Amerika masih tidak mengakui atas kemenangannya dalam Pilpres 2016 karena bersifat kontroversi. Presiden Trump dicurigai bahwa ada campur tangan Rusia terhadap kemenangannya. *Popular vote* Trump pada saat kampanye Presiden lebih rendah dibandingkan Hillary Clinton. Namun, pada hari Pemilihan 10 November 2016 Trump justru keluar sebagai pemenang.

Struktur Internasional yang Rapuh: Pengakuan atas Yerussalem dan dukungan kepada *Free Syrian Army*

Mendiskusikankan kebijakan Presiden Trump ke Timur Tengah yang paling menarik perhatian adalah pengakuan Yerussalem sebagai ibukota IsraeI. Kebijakan ini selain manifestasi sikap kontroversi, juga menjadi manifestasi sikap optimis karena akan memberi manfaat kepada dirinya. Ada dimensi pragmatisme yang mendasari kebijakan Presiden Trump seolah Trump tidak memerdulikan bahwa kebijakannya akan menuai kecaman dari dunia internasional. Kebijakan Presiden Trump atas kota Yerussalem dipandang kontroversi dan bersifat unilater (sepihak). Bahkan, masyarakat internasional bereaksi keras atas kebijakan Presiden Trump tersebut. Pada akhir 2017 negara-negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Muslim berinisiatif menyelenggarakan Kongres Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Istambul, Turki. Upaya ini untuk menolak kebijakan Presiden Trump tersebut. Penolakan ini berkaitan dengan fakta bahwa kota Yerussalem adalah kota suci tiga agama besar di dunia yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Dengan demikian, pengakuan tersebut secara implisit menunjukan keberpihakkan Presiden Trump kepada Israel (Yahudi) dan merampas nilai kedilan umat Islam dan Kristen di wilayah tersebut.

Kebijakan Presiden Trump yang berpihak kepada Israel bertentangan dengan peran Amerika sebagai juru damai yang harus dilakukan dalam sengketa Timur Tengah. Kebijakan Presiden Trump tersebut telah merugikan kepentingan rakyat Palestina karena secara tidak langsung melegitimasi pendudukan Israel di Yerussalem. Padahal Yerussalem Timur diperjuangkan untuk menjadi ibu kota Palestina maka upaya damai yang pernah dilakukan oleh Presiden Jimmie Cater melalui Perjanjian Camp David tahun 1978 menjadi porak poranda. Presiden Trump menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas hancurnya upaya damai antara Israel-Palestina yang dirintis pendahulunya.

Pengakuan Presiden Trump ini mendorong Pemerintah Israel semakin berkuasa atas wilayah tersebut. Kontrol kepada pemeluk agama Kristen dan Islam semakin ketat ketika mereka akan berkunjung ke wilayah tersebut. Akses untuk pemeluk Kristen ke Bethlehem dan pemeluk Islam ke masjid Al Aqsa semakin dipersulit. Padahal Bethlehem merupakan tempat yang besejarah bagi pemeluk Kristen karena tempat nabi Isa dilahirkan. Sedangkan Masjid Al Aqsa adalah masjid bersejarah bagi pemeluk Islam karena bagian dari rangkaian perjalanan Isra Mikraj Nabi Muhammad.

Kebijakan Trump terkait Yerussalem tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan yang tercantum pada Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776[17] yang justru mendorong pada pelanggaran HAM, khususnya hak kebebasan beragama bagi umat Kristen dan Islam di wilayah tersebut. Padahal, Amerika kerap mengkritik penegakkan HAM, demokrasi, dan kebebasan di negara lain. Misalnya Amerika mengkritik dan memberlakukan embargo senjata

[16] Kamran Dikarma, "Trump Jadi Presiden Terburuk dalam Sejarah AS", Harian Republika, 21 Februari 2018, hlm.7.

[17] US History, 2017, "The Declaration of Independence", http://www.ushistory.org/declaration/document/, diakses pada 20 Maret 2018.

kepada Myanmar karena negara ini melakukan pelanggaran HAM atas etnis Rohingya.[18]

Meskipun kebijakan Trump kontroversial, namun Presiden Trump optimis pada kebijakannya karena mendapat apresiasi dari Pemerintah Israel dan Kamunitas Yahudi Amerika (*America Israel Public Affairs Committee/AIPAC*). Karena kebijakan ini berdampak positif kepada dukungan terhadap *recovery economy* yang sedang dilakukan Amerika. Dalam Konferensi tahunan AIPAC pada 4 Maret 2018 di Washington dan dihadiri oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, kebijakan Presiden Trump dipuji.[19] Presiden Trump optimis langkahnya akan menjadi posisi tawar untuk mendapat dukungan dalam *recovery economy* dari para pebisnis Yahudi Amerika. Keberhasilan *recovery economy* ini setidaknya berhasil menciptakan lapangan kerja baru, memperbaiki sistem perdagangan yang lebih menguntungkan Amerika, dan meningkatkan dana tabungan masyarakat; seperti dilaporkan pada pidato kenegaraannya. Penciptaan lapangan kerja baru sejumlah 2,4 juta lapangan kerja, peningkatan nilai pasar saham mencapai 8 triliun merupakan catatan keberhasilan di sektor ekonomi selama setahun pemerintahannya.[20]

Gambaran di atas mencerminkan suatu anomali dalam panggung politik Amerika. Di satu sisi legitimasi politik Presiden Trump rendah, tetapi di sisi lain kinerja ekonomiannya cukup baik. Secara umum legitimasinya Trump rendah, namun karena Trump didukung oleh pebisnis dari kalangan Yahudi Amerika maka kinerja ekonomi pemerintahan Trump dinilai cukup berhasil. Seperti diketahui bahwa pebisnis Yahudi Amerika menguasai sektor jasa keuangan seperti, asuransi dan perbankan, disamping itu mereka juga menguasai sektor media massa.

Sebenarnya kebijakan pengakuan atas kota Yerussalem sebagai ibukota Israel ini sudah dirumuskan oleh Kongres Amerika sejak 1995 ditandai oleh disyahkannya *Jerussalem Embassy Act* dan menurut rencana dilaksanakan tahun 1999, tetapi baik Presiden Bush maupun Obama tidak melaksanakan,[21] karena masih menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang tidak setuju khususnya negara-negara Islam. Namun, sebagai tokoh yang dikenal kontroversial, nyatanya Trump tetap mengeluarkan kebijakan tersebut. Bahkan, Presiden Trump mengancam menghentikan kebijakan bantuan luar negeri kepada negara-negara yang mengkritiknya. Seperti diketahui mayoritas negara yang tergabung dalam Resolusi Majelis Umum PBB menolak kebijakan Presiden Trump terkait Yerussalem. Kebijakan ini dipandang oleh negara-negara lain sebagai kontroversi dan refleksi sikap kesewenang-wenangan atau unilateral (sepihak) terhadap negara lain.

Menanggapi kebijakan Trump di PBB, Indonesia merupakan salah satu negara yang menolak kebijakan kontroversi Presiden Trump atas Yerussalem. Sikap Indonesia ini menyebabkan posisi politik Indonesia berseberangan dengan Amerika dalam konflik Israel –Palestina. Dalam hal ini, Presiden Jokowi aktif menggalang dukungan untuk menolak kebijakan Presiden Trump. Untuk merespon sikap kebijakan kontroversi tersebut, Presiden Jokowi berkunjung ke Turki dan mendiskusikan strategi menghadapi kebijakan Presiden Trump tersebut. Strategi merespon kebijakan Trump ini dilakukan dalam pertemuan luar biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) akhir 2017. Jadi, kebijakan kontroversi Presiden Trump ini mengundang sikap protes dari berbagai negara di dunia khususnya yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Selain kebijakan kontroversial terkait status Yerussalem, Presiden Trump juga melakukan manuver di Suriah. Amerika mendukung salah

[18] Diyah Ratna Meta Novia,. "Mengaku Patuhi Embargo Myanmar, Israel Tetap Kirimi Senjata" 5 September 2017, http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/05/ovsguz-mengaku-patuhi-embargo-myanmar-israel-tetap-kirimi-senjata, diakses pada 18 Mei 2018.

[19] Laeny Sulistyawati dan Marniati. "Puji-Puji untuk Trump oleh Pelobi Yahudi." *Harian Republika*, 6 Maret 2018.

[20] Donald Trump, "President Donald J. Trump's State of the Union Address"., hlm.2.

[21] Bump Philip, "1995, Congress reached a compromise on the issue of Jerusalem. Trump is poised to end it, " 12 Juni 2017. https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/12/06/in-1995-congress-reached-a-compromise-on-the-issue-of-jerusalem-trump-is-poised-to-end-it/?noredirect=on&utm_term=.ac59c4360fb1, diakses pada 18 Mei 2018.

satu faksi anti Pemerintah Bashar al-Asaad yaitu *Free Syrian Army*.[22] Bahkan Amerika di bawah Presiden Trump pada tahun 2017 untuk pertama kali menyerang Suriah dengan menembakkan 54 rudal *tomahawk* kepada basis Pemerintah Assad. Dalam konflik di Suriah, Amerika hadir untuk mengimbangi kehadiran Rusia. Artinya, Amerika di bawah Presiden Trump terjebak terlalu jauh pada *the balances of power* di Suriah.[23] Rusia merupakan sekutu Suriah yang melibatkan Kelompok Kurdi dalam memerangi ISIS, dilain pihak hal ini ditentang oleh Turki yang punya kepentingan untuk mengisolasi Kurdi karena aksi kekerasan di Turki.[24] Sedangkan Amerika sebagai sekutu Turki terlibat persaingan dengan Rusia dalam distribusi energi di Timur Tengah khususnya di Suriah dan juga Amerika berkepentingan membangun kembali pengaruhnya di kawasan tersebut. Jadi, Presiden Trump mendorong Amerika terlibat dalam persaingan pengaruh di Suriah dengan mendukung salah satu faksi oposisi menghadapi Presiden Assad.

Provokasi di Semenanjung Korea

Kebijakan pertahanan Presiden Trump ke Asia didasarkan pada konsep *offshore balancing* [25] yaitu kebijakan pertahanan yang didasarkan pada aliansi regional negara-negara sahabat yang didukung oleh matra Angkatan Laut Amerika dalam merespon munculnya kekuatan yang membahayakan kepentingan Amerika. Kebijakan pertahanan Presiden Trump mencerminkan kompromi antara kebijakan fokus melihat ke dalam negeri Amerika di satu sisi dan tetap mempertahankan pengaruh globalnya di sisi lain.

Kebijakan pertahanan Presiden Trump ke Asia sebagian merupakan kelanjutan kebijakan pemerintahan Barack Obama, namun ada beberapa kebijakannya yang mengalami perubahan. Kebijakan aliansi militer Amerika dengan Jepang dan Korea Selatan merupakan landasan kebijakan pertahanan Amerika ke Asia.[26] Oleh karena itu, kehadiran militer Amerika di negara-negara ini akan berkesinambungan karena memiliki kepentingan strategis Amerika di Asia-pasifik.

Untuk mendukung kebijakan pertahanan Amerika di Asia, Jim Mattis, Menteri Pertahanan Amerika pada Januari 2018 juga melakukan kunjungan kerja ke Asia Tenggara, salah satunya ke Indonesia. Dalam kunjungannya, Amerika juga memberi bantuan alutsista dalam bentuk modernisasi 24 jet tempur F-16 dan penjualan 8 Helikoper Apache guna memperkuat sistem pertahanan. Pada kesempatan ini, Mattis juga mendiskusikan isu Indo-pasifik dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Indonesia ingin memainkan peran diplomasinya di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.[27]

Kunjungan ini sebagai isyarat Amerika di bawah Presiden Trump tetap berkomitmen dengan negara-negara di Asia Tenggara khususnya ASEAN. Amerika juga melakukan pendekatan khusus kepada Vietnam yang dipandang posisi politiknya bersebrangan dengan Cina. Amerika berkepentingan untuk menyertakan Vietnam dalam menghadapi Cina di kawasan. Oleh karena itu, Amerika berupaya menghangatkan kembali hubungan diplomatiknya dengan Vietnam yang sempat beku akibat Perang Vietnam tahun 1955-1975.

Pernyataan Presiden Trump pada pidato kenegaraan yang pertama di depan Kongres Amerika pada awal 2018 menyinggung situasi di Semenanjung Korea. Presiden Trump menggambarkan Pemerintah Korea Utara sebagai rejim otoriter yang secara brutal menindas

[22] Glori K.Wadrianto. "Inilah Pihak-Pihak yang terlibat Konflik Rumit di Suriah." 4 april 2017. https://internasional.kompas.com/read/2017/04/20/16434141/inilah.pihak-pihak.yang. Diakses pada 23 Mei 2018.

[23] Serdar S. Gurner."Shifting Balances Of Power In The Syrian Conflict" *Tukish Policy Quarterly*, 2017, http://turkishpolicy.com/article/853/shifting-balances-of-power-in-the-syrian-conflict, diakses pada 18 Mei 2018.

[24] Redaksi, "Turki Peringatkan Suriah Agar Tidak Bekerjasama Dengan Gerilyawan Kurdi", https://www.dw.com/id/turki-peringatkan-suriah-agar-tidak-bekerjasama-dengan-gerilyawan-kurdi/a-42655267, diakses pada 18 Mei 2018.

[25] Franz-Stefan Gady, "Time to Go 'Huge'? What Will Trump's Defense Policy in Asia Be? " 10 November 2016, https://thediplomat.com/2016/11/time-to-go-huge-what-will-trumps-defense-policy-in-asia-be/. Diakses pada 23 Mei 2018.

[26] Ai in Byung –Joon."The Strategic Environment: U.S. Power and Asian Regionjal." *ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian Community*, Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2003, hlm. 208.

[27] Dian Septiari, "US builds defense ties in SE Asia." Harian the Jakarta Post, 23 Januari 2018, hlm.10

rakyatnya dan membahayakan keamanan rakyat Amerika.

> "But no regime has oppressed its own citizens more totally or brutally than the cruel dictatorship in North Korea.
>
> North Korea's reckless pursuit of nuclear missiles could very soon threaten our homeland." [28]

Dalam hubungan diplomatik, Korea Utara terlibat permusuhan dengan Amerika terkait isu pengembangan senjata nuklirnya dan isolasi/ embargo ekonomi masyarakat internsional yang diprakarsai oleh Amerika atas negara tersebut. Namun demikian, dalam perjalannya terjadi perubahan sikap kedua pemimpin negara tersebut. Presiden Trump menjadi kooperatif kepada Korea Utara. Isyarat sikap kooperatif Presiden Trump ini disampaikan melalui akun twiternya pada Maret 2018 yang menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.[29]

Dalam pernyataannya via twitter Presiden percaya bahwa Korea Utara sudah tidak melakukan pengembangan rudal lagi dan dia menghormati komitmen tersebut. Hal ini mencerminkan perubahan sikap Presiden Trump dari konfrontatif menjadi kooperatif. Perubahan ini menggambarkan sikap in-konsisten dan kontorversi, namun dalam konteks positif karena berubah dari konflik menuju kerja sama. Jadi, tidak semua kebijakan Presiden Trump bersifat negatif, tetapi ada juga kebijakan kontroversi yang bersifat positif.

Hanya saja sikap masyarakat internasional terkesan tidak antusias melihat perubahan ini. Negara yang menyambut positif adalah Cina dan Korea Selatan. Sedangkan banyak pemimpin negara di dunia umumnya tidak begitu berharap banyak. Diduga mereka umumnya dalam posisi "*wait and see*." Mereka berpandangan bahwa perubahan dari konfrontatif kepada kooperatif ini belum bisa dijamin sungguh-sungguh menuju perdamaian di Semenanjung Korea. Jadi, masyarakat internasional masih ragu atas perubahan sikap Presiden Trump tersebut karena seringnya bersikap kontroversi dan tidak stabil. Publik masih bertanya-tanya apakah ini hanya strategi politik atau sungguh-sungguh upaya damai?

Jika dilihat dari perspektif pesimis, kedua pemimpin punya potensi besar berubah sikap yang menghambat perundingan. Kepribadian Presiden Trump adalah in-konsisten sehingga berpotensi untuk kembali berubah arah dari kerja sama kepada konfrontasi. Di lain pihak, Presiden Korea Utara Kim Jong Un seorang yang pemimpin yang otoriter sehingga juga berpotensi untuk membuat kebijakan tidak terkontrol. Dengan demikian, kedua pemimpin tesebut berpotensi untuk kembali bersikap konfrontatif sehingga menghambat rencana Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan pada Juni 2018 di Singapura.[30]

Namun demikian, dari perspektif optimis, KTT tersebut mengandung harapan untuk menuju perdamaian di Semenanjung Korea. Setidaknya KTT ini capaian minimal akan mengurangi eskalasi konflik di kawasan tersebut dan capain maksimal akal ditindak lanjuti oleh kedua belah pihak dengan diplomasi guna membangun saling percaya dan kerja sama untuk terciptanya perdamaian yang nyata. Pertemuan antar kedua pemimpin negara ini dalam perspektif diplomasi yaitu tradisi rasional dipandang tepat karena dimensi kemanusiaan dari kedua pemimpin ini memungkinkan menjawab tantangan dan peluang dari problematik yang sedang dihadapi.[31] Kedua kepala negara yang bertemu secara langsung dapat secara terbuka membicara kepentingannya masing-masing. Langkah ini dipandang lebih kondusif untuk mendiskusikan berbagai isu di kawasan tersebut.

Terlepas dari sikap optimis atau pesimis atas rencana ini, jalan menuju KTT tersebut tidak mudah karena adanya persyaratan atau tuntutan yang diinginkan oleh masing-masing pihak.

[28] Donald Trump. *President Donald J. Trump's State of the Union Addres*s., hlm 2

[29] Redaksi, "Korea Utara-AS: Setelah saling ancam, mengapa Donald Trump dan Kim Jong-un mau bertemu?", 9 Maret 2018, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43343416, diakses pada 20 Mei 2018.

[30] Redaksi, "Trump-Moon Atasi Krisis", Harian Kompas, 21 Mei 2018, hlm. 8 atau lihat juga https://kompas.id/baca/internasional/2018/05/21/trump-moon-atasi-krisis/, diakses pada 22 Mei 2018.

[31] Paul Sharp, *Diplomatic of International Relations*, (Cambride:Cambride University Press, 2009), hlm. 39.

Amerika ingin segera melucuti senjata nuklir Korea Utara, di lain pihak Korea Utara ingin ada jaminan terlebih dahulu bahwa Amerika tidak memberi perlindungan nuklir kepada Korea Selatan dan menarik 25.500 pasukannya dari Korea Selatan serta menghentikan latihan bersama Amerika dan Korea Selatan.[32] Kedua tuntutan ini sangat mendasar bagi masing-masing pihak sehingga tidak mudah dikabulkan, tetapi dalam negosiasi ada *take and give* atau kompromi.

Terkait dengan KTT tersebut, pada April 2018 dilaksanakan pelantikan Kim Chang Beom sebagai Duta Besar Korea Selatan di Jakarta bersamaan dengan itu Presiden Jokowi menawarkan diri bahwa Indonesia bersedia menjadi tuan rumah KTT tersebut.[33] Upaya Indonesia dipandang beralasan karena posisinya sebagai negara kekuatan menengah dan sudah sering terlibat dalam upaya damai di berbagai kawasan. Hanya saja seperti tersebut di atas para pihak sudah sepakat untuk melangsungkan KTT di Singapura.

Kebijakan Proteksi Perdagangan

Di bawah kepemimpinan Trump, Amerika melaksanakan kebijakan *inward looking foreign policy*. Amerika mundur dari beberapa kerja sama internasional; seperti keluar dari Perjajanjian Paris, TPP, UNESCO, sebaliknya melakukan penguatan ekonomi dalam negeri dan penutupan perbatasan serta penetapan kebijakan ekonomi proteksionis. Presiden Trump menetapkan kebijakan proteksi yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan semangat globalisasi. Kebijakan Presiden Trump merefleksikan anti-globalisasi dan anti-imigrasi.

Namun demikian, sebagian masyarakat memandang kebijakan Trump sebagai keberhasilan dalam membangun nasionalisme Amerika. Kebijakan proteksi ini juga memiliki resiko memperoleh balasan dari mitra dagang Amerika. Akhirnya kebijakan proteksi ini menimbulkan turbulensi tata perdagangan antar negara. Kebijakan proteksi ini menimbulkan kecemasan para pendukung perdagangan bebas dan globalisme di dalam negeri Amerika sendiri. Jadi, rakyat Amerika sebagian bersikap optimis, tetapi sebagian lagi bersikap pesimis atas kebijakan proteksionis ini.

Sebagai upaya mendukung kebijakan proteksi, Pemerintahan Presiden Trump membuat sejumlah keputusan. Hal itu antara lain; Pemerintah Amerika menetapkan kebijakan baru dalam sistem perdagangan di *North America Free Trade Area (NAFTA*). Amerika menetapkan secara sepihak adanya tarif 25% untuk impor baja dan 10% untuk impor almunium ke pasar Amerika. Kebijakan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk bangkit dan kembali memperkuat ekonomi Amerika.

Kebijakan Amerika ini menimbulkan kekecewaan dan protes dari kanada dan Meksiko sebagai negara anggota NAFTA. Akibat protes tersebut kebijakan protektif ini akhirnya berlaku selektif. Kedua negara ini mendapat pengecualian dari kebijakan proteksi perdagangan Amerika secara umum atas komoditi tersebut. Pemerintah Amerika berharap penetapan kebijakan proteksi ini mampu menguatkan industri dalam negeri Amerika. Logikanya kebijakan proteksi ini punya *multi-level effect* kepada penguatan sektor industri lain; seperti industri otomotif dan jasa kontruksi.

Kebijakan proteksionis ini sesungguhnya tidak sejalan atau in-konsisten dengan kaedah-kaedah perdagangan bebas yang selama ini disuarakan oleh Amerika ke seluruh dunia dan *Wolrd Trade Organization* (*WTO*). Dengan kata lain, kebijakan perdagangan yang ditetapkan Presiden Trump suatu yang bersifat kontroversi. Selama ini, masyarakat internasional diajak untuk menghormati prinsip perdagangan pasar bebas, tetapi sekarang giliran Amerika sendiri yang melanggarnya. Jadi, kebijakan Presiden Trump menimbulkan kebingungan masyarakat internasional khususnya kalangan dunia usaha.

Lebih lanjut ancaman proteksi ini sebenarnya tidak hanya ditujukan ke NAFTA, tetapi juga kepada Eropa dan Cina. Akibatnya, Eropa

[32] Redaksi, "Pertemuan Korut-AS terancam Gagal.", Harian Kompas, 17 Mei 2018, hlm.10

[33] Seno Tri Sulistiyono, "Jokowi Tawarkan RI Jadi Tuan Rumah Pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump", 30 April 2018, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/30/jokowi-tawarkan-ri-jadi-tuan-rumah-pertemuan-kim-jong-un-dan-donald-trump, diakses pada 18 Mei 2018.

khususnya Perdana Inggris mengkiritik kebijakan sepihak Donald Trump ini. Presiden Trump dinilai melanggar kaedah perdagangan bebas yang dijunjung tinggi dalam perdagangan internasional. Tentu saja kebijakan Presiden juga dipandang sebagai langkah yang kontroversi. Di lain pihak Cina juga merespon hal ini dengan mengumumkan bahwa sebenarnya tidak ingin terjebak "Perang Dagang" dengan Amerika, tetapi jika Amerika memulainya Cina tidak akan tinggal diam.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan proteksi, Komisi Perdagangan Amerika menetapkan ketentuan-ketentuan protektif. Komisi ini mengatur bahwa impor atas sejumlah komoditi tertentu, seperti alat-alat energi terbarukan dan mesin cuci adalah tindakan merugikan industri manufaktur dalam negeri Amerika. Implisit upaya ini untuk melindungi industri dalam negeri Amerika. Harapannya komoditi produk domestik tersebut memperoleh pasar di dalam negeri. Hanya saja pasar yang didapat oleh komoditi tersebut adalah tidak adil karena hasil proteksi. Berbeda halnya jika penguatan pasar tersebut didapatkan karena kompetisi dan kualitas unggul dari produk domsetik tersebut. Jadi, Presiden Trump memandang kebijakan proteksionis akan mendongkrak perekonomian Amerika,[34] yang sedang dalam proses *recovery economy*.

Selanjutnya, kebijakan lain yang ditempuh oleh Pemerintahan Presiden Trump adalah upaya memperkarakan perusahan-perusahaan Cina yang bergerak di bidang teknologi tinggi dengan mengangkat isu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).[35] Memang faktanya banyak perusahaan-perusahaan Cina belum menghormati HAKI khususnya paten yang dimiliki ilmuwan Amerika. Hal ini suatu yang ironis karena Cina sekarang sudah menjadi "raksasa ekonomi dunia". Jika pelanggaran HAKI dilakukan beberapa tahun yang lalu dimana ekonominya baru tumbuh maka mungkin bisa dimaklumi. Sebaliknya ketika ekonominya sudah berkembang pesat maka para pengusaha Cina seharusnya sudah menghormati HAKI atau hak paten ilmuwan Amerika. Dengan demikian, upaya Presiden Trump menyadarkan pengusaha Cina agar menghormati hak cipta orang lain perlu dilakukan, meskipun tindakan Trump kemungkinan memicu terjadinya perang dagang dengan Cina.

Kondisi tersebut pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2009 saat Amerika dipimpin oleh Presiden Amerika Barack Obama menetapkan kebijakan mengenakan tarif 35persen atas produk ban kendaraan dari Cina. Akibatnya, kelompok besar industri di Asia membalas dengan memberlakukan pembatasan import makanan dari Amerika.[36] Hal ini dikarenakan, industri ban Cina memiliki pengaruh tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Kebijakan pembatasan import ini diikuti oleh pebisnis di negara lain karena sudah terbangun jaringan bisnis yang kompak. Artinya jaringan pebisnis Cina memiliki kekuatan regional dan global yang bisa digunakan sebagai pemukul lawannya. Konsekuensi dari "Perang Dagang" adalah memperlemah sektor bisnis di kedua negara.

Dengan demikian, kebijakan tarif yang dikenakan Presiden Trump terhadap mitra dagangnya khususnya Cina akan berpotensi mendapat balasan. Untuk jangka pendek kebijakan protektif Presiden Trump akan menguntungkan negaranya karena akan memberi ruang bagi berkembang industri dalam negeri. Namun demikian, kebijakan akan dibalas oleh lawannya sehingga akan mematikan sektor bisnis yang dibalas tersebut. Pada gilirannya produk Amerika lain yang kena imbas akan kehilangan pasar di satu negara. Jadi, di satu sisi memberi efek positif, tetapi disisi lain akan memberi efek negatif kepada komoditi lain yang terkena imbasnya dan kehilangan pasar tersebut.

Kondisi berbeda justru dilakukan Amerika terhadap Israel. Presiden Trump melakukan kunjungan ke Israel pada Mei 2017. Dalam kesempatan tersebut Presiden Trump meminta agar defisit Amerika dalam perdagangan kedua negara dikurangi.[37] Difisitnya hampir mencapai

[34] Richard Javad Heydarian.."What a US-China trade war would look like", 2018 https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/china-trade-war-180201121746516.html, diakses pada 16 Maret 2018.

[35] *Ibid*

[36] *Ibid*

[37] Staf Reuter"Trump wants more U.S.-Israeli trade with narrower U.S. deficit" 22 Mei 2017. https://www.reuters.com/

$10 Milyar. Presiden Trump berharap Israel membuka pasar produk Amerika lebih besar lagi. Ekspor Amerika ke Israel $8.1 Milyar sedangkan impor mencapai $17.6. Milyar. Kedua negara akan tetap melaksanakan perdangan bebas yang sudah disepakati sejak tahun 1985.[38] Dengan demikian, Presiden Trump juga memperjuangkan kepentingan ekonomi kepada Israel, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain. Amerika juga tetap menjamin perdagangan bebas dengan Israel, sedangkan dengan negara-negara lain kebijakannya mengarah kepada 'Perang Dagang".

Oleh karena itu, di dalam tatanan ekonomi global atau sistem ekonomi internasional ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi.[39] Jika perilaku ekonomi suatu negara tidak sejalan dengan prinsip-prinsip itu dipandang bersikap in-konsisten dengan aturan yang ada. Sikap in-konsisten ini akan diikuti oleh kebijakan kontroversi dalam bidang ekonomi. Salah satu aturan main atau prinsip yang disepakati oleh masyarakat internasional adalah prinsip perdangagan bebas. Rejim perdagangan bebas ini berjalan dibawah kendali Organiasasi Perdagangan bebas atau *Wolrd Trade Organization* (WTO). Dengan demikian, Forum WTO ini tempat penyelesaian jika terjadi "Perang Dagang" antar negara.

Tidak mudah memberi pemahaman sistem perdagangan internasional yang adil. Hanya saja secara konsep hal itu dapat dirumuskan dengan sejumlah kesepakatan. Terdapat dua argumen bahwa untuk tercapai perdagangan internasional yang adil. Jika rival punya standard lingkungan dan tenaga kerja yang lebih rendah, suatu negara dapat melakukan identifikasi; *pertama,* rival telah melakukan dumping maka suatu negara boleh meresponnya dengan kebijakan tarif, *kedua,* hal ini dapat mendorong kepada persaingan yang akan menurunkan standard kualitas dari yang diinginkan sebelumnya.[40] Konsekuensi rumusan yang berujung pada sistem perdagangan adil tersebut dapat menurunkan standar kualitas produk dari suatu negara. Jadi pada akhirnya, masyarakat juga yang dirugikan karena harus mengkonsumsi produk dengan kualitas di bawah standard.

Sementara itu, Presiden Trump mengancam jika perusahaan-perusahaan Amerika di Eropa dikenakan tarif sebagai akibat Perang Dagang maka mobil-mobil Eropa yang masuk pasar Amerika pasti juga akan dikenakan tarif. "If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S."[41] Dengan demikian, Amerika juga melaksanakan kebijakan proteksi kepada Eropa yang selama ini lebih dikenal sebagai mitranya.

Setelah Presiden Trump menyatakan akan memberi sangsi kepada industri di Eropa, sebaliknya para pemimpin Uni Eropa memperingatkan akan membalas kebijakan tersebut. Pihak Eropa akan memberlakukan tarif bagi produk-produk insdutri Amerika yang masuk pasar Eropa seperti sepeda motor, Kentucky, bourbon dan Harley-Davidson.[42] Presiden Trump memberlakukan sangsi atau melakukan kebijakan proteksionis sebagai upaya *recovery economy*nya. Dia berpandangan sistem perdagangan berlangsung antara Eropa –Amerika selama ini tidak adil. Produsen mobil Amerika sulit mengekspor mobil mereka ke Eropa, sebaliknya mobil-mobil Eropa banyak masuk ke Amerika, misalnya merk mobil Mercedes-Benz dengan mudah dapat dijumpai di jalan-jalan New York, tetapi sebaliknya hanya sediki merk mobil Chevrolet berada di jalanan kota-kota Eropa.[43]

article/us-usa-trump-israel-trade/trump-wants-more-u-s-israeli-trade-with-narrower-u-s-deficit-idUSKBN18I1RC, diakses pada 23 Mei 2017.

[38] *Ibid*

[39] David.A. "Reidy.Just a Global Economy:In Defense of Rawls. "The Journal of Ethics. Vol. 11, No. 2 (June 2007), hlm. 96. (www.JSTOR.org.stable/20720850037sq=1&cidpdf reference # reference_tab_content, diakses 16 Maret 2018) .

[40] Jagdish Bhagwati. "After Seattle: Free Trade and the WTO" *Royal Institute of International Affairs* , Vol. 77, No.1 (Jan 2001), hlm.21. http://www.jstor.org/stable/2626551, diakses pada 21 Maret 2018.

[41] Emily Cochranemarch. "Escalating Trade Fight, Trump Threatens Higher Taxes on European Cars," 2018, https://www.nytimes.com/2018/03/03/us/politics/trump-european-cars-tariff-trade.html, diakses pada 16 Maret 2018.

[42] *Ibid*

[43] *Ibid*

Penutup

Kesimpulan yang bisa ditarik dari analisis pada bagian sebelumnya bahwa setiap kepribadian Presiden Amerika berkorelasi dengan corak kebijakan yang ditempuhnya. Kebijakan-kebijakan kontroversi dari Presiden Trump disebabkan latar belakangi kepribadiannya. Kerpibadian Presiden Trump bersifat aktif-negatif memiliki ciri-ciri: in-kosisten, sentimentil, dan punya rasa optimis. Jadi, ketiga unsur kepribadian ini khususnya kepribadian in-konsisten menjadi stimulus lahirnya kebijakan-kebijakan yang kontroversi dibidang politik dan ekonomi sehingga menimbulkan turbulensi pada tatanan regional dan global.

Kebijakan kontroversi Presiden Trump menimbulkan turbulensi tatanan politik dan ekonomi dunia. Secara politik, kebijakan Amerika memberi pengakuan ibukota Israel adalah Yerussalem meningkatkan eskalasi konflik Timur Tengah. Bahkan, hal ini menimbulkan korban jiwa sejumlah rakyat Palestina di Jalur Gaza dan juga menyebabkan kemarahan umat Islam di dunia. Selanjutnya, pernyataan bernada provokasi Presiden Trump kepada Korea Utara, Cina, dan Rusia yang disampaikan pada pidato tahunan di depan Konggres awal 2018 telah mengundang ketegangan diplomatik.

Selanjutnya secara ekonomi, kebijakan kontroversi Presiden Trump di bidang perdagangan yaitu proteksi telah menyebabkan turbulensi sistem perdagangan yang menjurus kepada Perang Dagang. Kebijakan penetapan tarif import yang diberlakukan Amerika mendorong Cina dan sejumlah negara melakukan hal serupa sehingga situasi ini bergerak menuju Perang dagang. Dalam perkembangannya, Amerika-Cina melakukan perundingan untuk menghindari terjadinya Perang dagang yang lebih parah dan membahayakan tatanan ekonomi dunia. Hanya saja harus diakui bahwa tidak mudah mencapai kesepakatan dalam perundingan tersebut sehingga potensi Perang dagang masih ada.[44] Artinya ancaman terhadap tatanan ekonomi dunia masih terbuka.

Rekomendasi khusus untuk mengantisipasi kerja sama perdagangan Indonesia- Amerika, Pemerintah perlu mengintensifkan langkah-langkah strategis-komprehensif. *Pertama*, *people to people approach* masyarakat kedua negara diberi ruang seluas-luasnya untuk bekerja sama, kunjungan, dan berkomunikasi. *Kedua*, *government to government approach,* Pemerintah kedua negara disadarkan perlunya komunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau isu yang terkait dengan kepentingan nasional kedua negara. *Ketiga*, *business to business approach*, pengusaha kedua negara perlu diberi fasilitas dan insentif untuk meningkatkan kerja sama baik disektor investasi maupun perdagangan.

[44] Redaksi, "AS-China: Tidak ada Perang dagang." Harian Kompas, 21 Mei 2018, hlm.9.

Daftar Pustaka

Buku

Ahn, Byung –Joon. "The Strategic Environment: U.S. Power and Asian Regionjal." *ASEAN-Japan Cooperation*: *A Foundation for East Asian Community*, Tokyo: Japan Center for International Exchange. 2003.

Irish, Marian D., *The Politics of Aemrican Democracy*, New Jersey: Prentice Hall Intrenational, Inc. 1965.

Sharp, Paul. *Diplomatic of International Relations*. Cambride: Cambride University Press, 2009.

Wittkopf, Eugene. R,. *American Foreign Policy: Pattern and Process*. California: Thompson Higher Education. 2008.

Jurnal dan Dokumen

Bhagwati, Jagdish. "After Seattle: Free Trade and the WTO" dalam *Royal Institute of International Affairs*. Vol. 77, No.1 (2001). http://www.jstor.org/stable/2626551,diunduh pada 21 Maret 2018.

Barry Buzan. "The Idea of "International System": Theory Meets History" *International Political Science Review*. Vol. 15, No. 3 (1994). http://www.jstor.org/stable/1601200, diunduh pada 24 Mei 2018.

Bump, Philip."1995 Congress reached a compromise on the issue of Jerusalem. Trump is poised to end it. " https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/12/06/in-1995-congress-reached-a-compromise-on-the-issue-of-jerusalem-trump-is-poised-to-end-it/?noredirect=on&utm_term=.ac59c4360fb1, diunduh pada 18 Mei 2018.

David. A. "Reidy Just a Global Economy:In Defense of Rawls." *The Journal of Ethics*. Vol. 11, No. 2 (June 2007). www.JSTOR.org. stable/20720850037sq=1&cidpdf reference # reference_tab_content, diunduh pada 16 Maret 2018.

Hatsuse, Ryuhei, "Intenational System," *Government and Politics*. Vol.II. Kobe: Kobe University.

Kellerman, Barbara dan Ryan J. Barilleaux, "The President as World Leader"

Presidential Studies Quarterly, Vol. 22, No. 4 (1992). http://www.jstor.org/stable/27551053, diunduh pada 13 Maret 2018.

Sumber Internet dan Surat Kabar

BBC. 2018. "Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dipecat Presiden Donald Trump". http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43389324, diunduh pada 18 Mei 2018.

BBC. 2017. "Menlu AS Rex Tillerson bantah dia mempertimbangkan untuk mundur", http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41505679, diunduh pada 18 Mei 2018.

Cochranemarch, Emily. 2018 ." Escalating Trade Fight, Trump Threatens Higher Taxes on European Cars." https://www.nytimes.com/2018/03/03/us/politics/trump-european-cars-tariff-trade.html, diunduh pada 16 Maret 2018.

Dyah Ratna Meta Novia. 2017. "Mengaku Patuhi Embargo Myanmar, Israel Tetap Kirimi Senjata." 5 September 2017. http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/05/ovsguz-mengaku-patuhi-embargo-myanmar-israel-tetap-kirimi-senjata, diunduh pada 18 Mei 2018.

Dian Septiari. 2018. "US builds defense ties in SE Asia." *the Jakarta Post*. 23 Januari.

Heydarian, Richard Javad. 2018 ."What a US-China trade war would look like." https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/china-trade-war-180201121746516.html, diunduh pada 16 Maret 2018.

Independent. 2018. " Donald Trump says North Korea agrees to not test missiles 'through meetings," https://www.independent.ie/world-news/north-america/donald-trump-says-north-korea-agrees-to-not-test-missiles-through-meetings-36691202.html,diunduh pada 23 Maret 2018.

Leny Sulistyawati dan Marniati. 2018. "Puji-Puji untuk Trump oleh Pelobi Yahudi." *Republika*. 6 Maret.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). http:KBBI.web.id./turbulensi, diunduh pada 12 Maret 2018.

Kamran Dikarma. 2018. "Trump Jadi Presiden Terburuk dalam Sejarah AS." *Republika*, 21 Februari.

Kompas. 2018. "AS-China: Tidak ada Perang dagang." *Kompas.* 21 Mei.

Kompas. 2018. "Pertemuan Korut-AS terancam Gagal." *Kompas.* 17 Mei

Kompas. 2018. "Trump-Moon Atasi Krisis." *Kompas*. 21 Mei.

Gurner, Serdar S. "Shifting Balances Of Power In The Syrian Conflict" *Tukish Policy Quarterly*. 2017. http://turkishpolicy.com/article/853/shifting-balances-of-power-in-the-syrian-conflict, diunduh pada 18 Mei 2018.

Glori K.Wadrianto.2017. "Inilah Pihak-Pihak yang terlibat Konflik Rumit di Suriah," dalam https://internasional.kompas.com/read/2017/04/20/16434141/inilah.pihak-pihak, diunduh pada 23 Mei 2018.

Redaksi. "7 Pejabat Donald Trump yang Mengundurkan Diri," https://kumparan.com/@kumparannews/7-pejabat-donald-trump-yang-mengundurkan-diri, diunduh pada 17 Mei 2018.

Trump, Donald. 2017. "The Inaugural Address". January 20. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/, diunduh pada 17 Maret 2018.

Trump, Donald. 2018. "President Donald J. Trump's State of the Union Address." January 30. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-state-u, diunduh pada 17 Maret 2018.

US History. 2018. "The Declaration of Independence." http://www.ushistory.org/declaration/document/, diunduh pada 20 Maret 2018.

Reuter "Trump wants more U.S.-Israeli trade with narrower U.S. deficit," https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel-trade/trump-wants-more-u-s-israeli-trade-with-narrower-u-s-deficit-idUSKBN18I1RC, diunduh pada 23 Mei 2017.

Stefan Gady, 2016. Franz- "Time to Go 'Huge'? What Will Trump's Defense Policy in Asia Be?" https://thediplomat.com/2016/11/time-to-go-huge-what-will-trumps-defense-policy-in-asia-be/, diunduh pada 23 Mei 2018.

Seno Tri Sulistiyono. 2018. "Jokowi Tawarkan RI Jadi Tuan Rumah Pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump." http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/30/jokowi-tawarkan-

ri-jadi-tuan-rumah-pertemuan-kim-jong-un-dan-donald-trump, diunduh pada 18 Mei 2018.

VOA Indonesia. "Trump Sebut Jaksa Agung Sessions 'Memalukan'" https://www.voaindonesia.com/a/trump-sebut-jaksa-agung-memalukan-/4275462.html, diunduh pada 17 Mei 2018.

Waltz, Kenneth.2003. "The Idea of Structure in International Relations Theory," http://globetrotter.berkeley.edu/people3/Waltz/waltz-con4.html, diunduh pada 21 Mei 2018.

TENTANG PENULIS

Indriana Kartini

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Saat ini penulis tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI. Penulis dapat dihubungi melalui email: indriana.kartini@gmail.com

Meutya Viada Hafid

Penulis merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar sejak 2009 hingga kini. Lahir di Bandung pada 3 Mei 1978 dan memulai karirnya sebagai jurnalis di Metro TV. Penulis menyelesaikan pendidikan pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. adapun penulis dapat dihubungi melalui email: meutyahafidinfo@gmail.com

Arif Novianto

Penulis merupakan Asisten peneliti di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Peneliti di Pusat Studi Jerman UGM pada tahun 2015. Penulis dapat dihubungi melalui *email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id*

Lukman Kurniawan

Penulis merupakan Alumnus Departemen Sosiologi FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman pada tahun 2015.

Samodra Wibawa

Penulis merupakan Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman.

Siswanto

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tergabung dalam tim penelitian Politik Luar Negeri, penulis sudah banyak menghasilkan karya-karya baik buku maupun jurnal. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: sish_jakarta@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bidang kajiannya adalah perbatasan. Sudah banyak karya berupa buku maupun jurnal yang ditulis oleh beliau. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: irewati62@gmail.com

M. Fakhry Ghafur

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tergabung dalam tim penelitian Agama dan Politik. Bidang kajiannya meliputi Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Penulis dapat dihubungi di email: fachryghafur@gmail.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis merupakan peneliti madya di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fokus kajiannya adalah Otonomi dan Pemerintahan Daerah. Saat ini penulis tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Penulis dapat dihubungi melalui email: nyimas.letty@gmail.com; nyimas.letty@yahoo.com

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan kandidat peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia merupakan Alumnus *Global Studies Programme Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg,* Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com
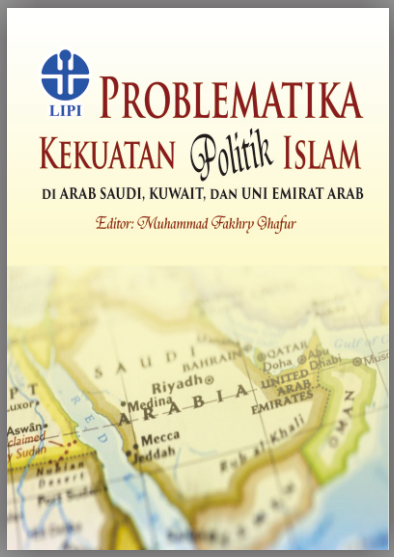
Informasi
Hasil Penelitian Terpilih